



SOSIALISASI DAN LITERASI POLITIK BAGI GENERASI MILENIAL JAWA BARAT**Oleh****Diah Fatma Sjoraida¹, Novie Indrawati Sagita², S. Kunto Adiwibowo³,****Aat Ruchiat Nugraha⁴****^{1,2,3,4}Universitas Padjadjaran****E-mail: ¹diah.fatma@unpad.ac.id**

Article History:*Received: 01-12-2022**Revised: 19-12-2022**Accepted: 24-12-2022***Keywords:***Milenial, Politik, Elit Partai,**Sosialisasi, Literasi*

Abstract: *Milenial adalah generasi yang usianya berkisar antara 24 hingga 39 tahun. Telah dipastikan bahwa generasi ini berpartisipasi dalam semua jenis pemilihan parlemen. Jelang pemilihan umum 2024, generasi milenial menjadi sumber suara yang cukup menentukan bagi para elit politik maupun elit partai untuk dapat membawa mereka ke kursi parlemen maupun kekuasaan. Oleh sebab itu, kami tim pengabdian pada masyarakat Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran melaksanakan pemberian sosialisasi dan literasi politik sebagai wujud pembekalan pengetahuan bagi pemilih pemula di Jawa Barat. Kegiatan ini memberikan dampak yang cukup baik secara pengetahuan bagi pemilih pemula agar dapat menentukan pilihannya dan tidak terhasut oleh informasi-informasi hoaks seputar politik.*

PENDAHULUAN

Generasi milenial menjadi topik perbincangan yang cukup hangat di berbagai kalangan terutama dalam peranya di dunia politik. Generasi milenial adalah generasi muda yang berumur antara 17-37 tahun. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah generasi milenial mencapai 69,38 juta jiwa atau sekitar 25,87% dari populasi Indonesia. Sementara untuk generasi Z mencapai 74,93 juta jiwa atau sekitar 27,94% dari total penduduk Indonesia (Budiati et al., 2018). Besarnya jumlah populasi generasi milenial dan generasi Z ini sungguh sangat penting mengingat peran strategis mereka sebagai penerus pembangunan bangsa Indonesia. Memperhatikan jumlah tersebut, posisi milenial saat ini menjadi bagian utama yang akan menentukan kondisi kehidupan berpolitik yang beradab di masa kini dan masa yang akan datang. Artinya, generasi milenial adalah bagian dari penentu kemajuan dan keberhasilan demokrasi, baik ditingkat daerah maupun nasional. Generasi milenial erat kaitannya dengan informasi dan komunikasi digital, sehingga komunikasi yang digunakan berkembang sesuai dengan kebutuhan (Pohan, 2019).

Dalam dunia “politik praktis” maupun “politik etis”, generasi milenial dan juga generasi post-milenials, akhir-akhir ini sudah mulai menunjukkan peran dan kontribusi yang cukup menonjol. Di usia mereka yang terbilang muda, mereka sudah berani terjun ke dunia politik, yang kata orang selama ini “politik itu kejam”. Sebagai contoh, pada Pemilu 2019, kita dapat temukan banyak sekali generasi milenial yang berpartisipasi dalam Pemilihan anggota legislatif, dari tingkat kabupaten/kota, provinsi hingga pusat. Di tingkat pusat (DPR RI), di tahun 2019 ada 52 caleg terpilih dari kalangan milenial. Generasi milenial menganggap



bahwa topik politik sebagai topik yang biasa saja tetapi tetap mengikuti berita-berita politik yang diakses dari media online dan televisi. Partisipasi politik responden juga cenderung rendah (Juditha & Darmawan, 2018).

Walaupun pada 2019 sudah ada kemajuan dari banyaknya aktor politik yang berasal dari kaum muda-mudi setidaknya sudah menunjukkan bahwa partisipasi politik generasi milenial cukup tinggi. Sebaliknya, lingkungan politik yang semakin terbuka ternyata tidak mampu juga untuk dapat meningkatkan partisipasi politik generasi muda secara 100% (Perangin-angin & Zainal, 2018). Secara teoritis, partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pemimpin negara, ikut serta dalam Pemilu, atau melakukan aktivitas yang secara langsung ataupun tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah. Yang menarik, generasi milenial di era 4.0 ini memiliki karakter dan perilaku politik yang khas dalam melakukan partisipasi politik. Dalam satu dekade terakhir, mereka sangat aktif menjadi bagian atau segmen masyarakat yang paling banyak menggunakan media sosial berbasis internet dalam merespon isu-isu politik maupun dalam melakukan aktivitas politik.

Perlu diketahui bahwa penggunaan internet di kalangan milenial hari ini sudah mencapai 88,5 persen. Intensitas generasi milenial ini dalam menggunakan teknologi informasi berbasis internet telah menjadi trend sekaligus rutinitas yang terkadang mengambil sebagian besar waktu mereka. Media sosial ini sangat efektif sebagai sarana untuk melakukan penyebaran informasi, pengembangan pengetahuan, termasuk untuk melakukan kampanye politik (Komariah & Kartini, 2019).

Selama ini, partisipasi politik generasi muda (terutama mahasiswa) pada umumnya lebih banyak memilih posisi di luar kekuasaan. Mereka berpolitik secara etis, sebagai penjaga moralitas politik publik. Pandangan mahasiswa bahwa pilihan itu adalah pilihan yang baik dan memang harus ada sebagian generasi muda yang berperan sebagai alat kontrol kekuasaan di setiap zaman. Namun, tidak ada salahnya pula apabila ada sebagian dari generasi muda yang sudah mulai terjun ke dunia politik praktis untuk mempersiapkan diri melanjutkan estafet politik tanah air. Namun, jangan sampai generasi muda kehilangan idealismenya begitu masuk ke dunia politik. Mereka harus tetap memegang teguh nilai-nilai kebaikan, kebenaran dan keadilan, sebagaimana kata Aristoteles, bahwa politik adalah usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama. Jadi, hakikatnya berpolitik adalah ikhtiar untuk mewujudkan kebaikan bersama, bukan kerusakan bersama. Itu yang harus dicamkan oleh generasi milenial.

Kewajiban kaum milenial adalah pemegang kendali dunia politik untuk mendorong perwujudan demokrasi. Kaum milenial dituntut untuk bersikap aktif membantu pemerintah dalam memberikan masukan dan mengkritisi kebijakan pemerintah. Jangan hanya berdiam diri, namun berpikirlah kritis untuk ikut serta menjaga kondusifitas daerah. Proses demokrasi perlu dibenahi karena menurutnya demokrasi kelewat batas yang menjadi masalah di negeri kita. Maka, generasi milenial harus dapat merubah haluan tersebut menjadi demokrasi yang berkesinambungan.

Berdasarkan latar belakang di atas, tim Pelaksana Pengabdian pada Masyarakat Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran melaksanakan kegiatan pengabdian di kalangan generasi muda yang terkait dengan politik. Pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu bentuk penjabaran dari tri darma perguruan tinggi dalam menyebar luaskan hasil penelitian yang telah dilaksanakan sehingga memberikan informasi yang



ilmiah kepada masyarakat luas (Rasyid et al., 2022).

METODE

Dalam melaksanakan kegiatan PPM Unpad Periode Januari – Desember 2022 tim melakukan kunjungan sebagai langkah prasurevei dan survei rencana pelaksanaan kegiatan untuk menemui pimpinan wilayah dalam rangka shilaturhami dan menyampaikan maksud dan tujuan mengenai pelaksanaan PPM Dosen. Setelah melakukan kunjungan di wilayah yang berpotensi memiliki generasi milenial yang banyak serta aktif, tim PPM Dosen – KKN Mahasiswa selanjutnya melakukan pemetaan wilayah dengan cara mengobservasi dan melakukan wawancara ke generasi milenial untuk mengetahui keadaan perkembangan di sektor politik dan pemerintahan, khususnya dalam informasi dan cara berkomunikasi generasi milenial dalam menyampaikan aspirasinya. Dari hasil pemetaan masalah, tim melakukan konsolidasi dengan mengadakan rapat via *zoom meeting* untuk dapat menentukan kegiatan-kegiatan lainnya.

Sasaran kegiatan pengabdian pada masyarakat ini adalah generasi milenial. Adapun teknik pelaksanaan pengabdian pada masyarakat ini, tim melakukan proses tes pengetahuan dan pemetaan jenis sosio-demografi dengan menggunakan pendekatan partisipasi aktif melalui pemanfaatan sarana media virtual. Untuk mengetahui sejauhmana tingkat efektifitas dalam pelaksanaan kegiatan dan akibatnya dalam bentuk Pretest dan Postest kegiatan yang dilakukan secara langsung dalam bentuk kuesioner. Hal ini dilakukan sebagai indikator keberhasilan dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian pada masyarakat dari sisi perubahan kognitif yang dimiliki generasi milenial mengenai materi dalam kegiatan pengabdian ini.

HASIL

Kondisi demokrasi dan politik di Indonesia saat ini sedang menuju pesta demokrasi lima tahunan. Bagi infrastruktur politik, pemilu merupakan ranah strategis untuk mengubah pembangunan bangsa. Pentingnya *branding* politik bagi partai politik yang utamanya mengikuti kontestasi lima tahunan dalam sistem pemilu di Indonesia untuk meningkatkan popularitas dan elektabilitas (Rachmadi & Budianto, 2020). Hal ini menjadi peluang untuk memberikan edukasi secara baik ke pihak generasi muda yang akan meneruskan proses pembangunan bangsa di masa depan. Untuk dapat menstimulus generasi muda agar mau terlibat dalam kegiatan politik, tim PPM memetakan potensi politik peserta untuk melihat seperti apa pandangan mereka terhadap kehidupan demokrasi Indonesia hari ini dalam perspektif dari milenial.

Berdasarkan pemetaan disaat pelaksanaan kegiatan sosialisasi, tim PPM mendapatkan beberapa kata kunci bahwa demokrasi yang prosedural belum tertuju dengan baik apalagi menuju pada demokrasi substansial. Selain itu, tim juga mengkategorikan beberapa problematika yang terjadi pada demokrasi prosedural dan juga masih terus mewarnai seperti misal, adanya pelanggaran yang berkaitan dengan politik uang daftar pemilih, kemudian logistik, politik identitas yang masih terus sangat menguat yang itu di bumbu dengan ujaran-ujaran kebencian sampai dengan rekap pemungutan dan penghitungan suara, manipulasi suara.



Gambar 1.

Neni Nur Hayati, M.I.Kom memberikan materi mengenai Sosialisasi dan Literasi Politik bagi Generasi Milenial

Sumber: PPM, 2022

Pada sesi selanjutnya, tim PPM menghadirkan narasumber Neni Nur Hayati selaku Direktur Democracy and Electoral Empowerment Partnership Indonesia yang menyampaikan materi tentang “Partisipasi Anak Muda dalam Mewujudkan Pemilu Serentak 2024”. Dalam pemaparannya pemateri menyampaikan bahwa apa dan bagaimana dampaknya demokrasi saat ini terhadap kaum milenial. Hal ini sebagaimana terlihat dalam materi slidanya sebagai berikut:



Gambar 2.

Submateri mengenai Sosialisasi dan Literasi Politik bagi Generasi Milenial
Sumber: PPM, 2022



Dalam pandangan pemateri menyampaikan bahwa perlunya anak-anak muda terlibat dalam politik untuk dapat memperbaiki kondisi demokrasi saat ini yang hampir dikuasai oleh oligarki, salah satunya momen pemilu. Pemilu yang bebas merupakan cermin dari masyarakat yang demokratis (Suhadiyanto & Lestari, 2008). Selanjutnya juga, pemateri menantang pada generasi milenial untuk dapat memilih apakah mau terjun kelapangan dan kemudian menentukan demokrasi yang seperti apa yang kita harapkan atau mau seperti saat ini. Karena generasi saat ini, 10 tahun, 20 tahun yang akan datang yang memimpin demokrasi adalah anda yang disebut sebagai generasi milenial. sehingga, peran dan kontribusi anak muda kedepan itu sangat menentukan maju mundurnya demokrasi dengan adanya partisipasi kelompok milenial seperti mau terlibat sebagai penyelenggara pemilu atau kandidat pasangan calon atau anggota legislatif, dan lain sebagainya. Arahan materi ini telah memberikan stimulus pada ranah komunikasi politik. Komunikasi politik partai politik dinilai berhasil bila pesan-pesan politik yang disampaikannya melalui saluran-saluran yang dipilihnya mendapat respon positif dari publik/massa berupa kesediannya untuk memberikan dukungan politik berupa legitimasi politik (Saefullah & Rezeky, 2017).

Peran komunikasi politik itu memang harus dimainkan oleh elemen politik bangsa, termasuk mesin politik dan target konstituen politik. Namun yang perlu diperhatikan adalah bagaimana memainkan peran itu dengan benar tentu harus ada etika politik yang mereka junjung tinggi sehingga proses politik dan demokrasi kita berjalan sesuai perundang-undangan dan konsensus bersama seperti apa di kemukakan oleh Thomas Homs sehingga kita juga bisa menghasilkan demokratis dimana ada ruang partisipasi dan ada kritis masyarakat. kondisi dapat rerwujud apabila adanya kesetaraan komunikasi informasi yang menjadi sangat penting untuk bisa mendapatkan pendidikan politik yang baik dari partai politik, penyelenggara pemilu atau *stakeholder* terkait. Lebih lanjut, Neni menyampaikan pemikirannya bahwa kondisi saat ini yang membuat demokrasi Indonesia yang belum *full* Demokrasi karena pendidikan politik masyarakatnya masih di bilang cukup rendah apalagi berkaitan dengan literasi politik.

“So I think the is the big problem di Indonesia di bidang politik”.

Bagaimana anak muda dalam kondisi seperti ini, mereka memiliki peran yang signifikan, mau dimana pun, peran itu dimainkan dengan baik dan apabila mau menjadi pemilih juga jangan jadi pemilih yang apatis yang cuma datang ke TPS terus mencoblos suara itu sudah selesai. Tetapi, bagaimana mengawal kekuasaan yang sudah terbentuk karena kalau kita ditanya bagaimana peran kita saat ini dalam demokrasi dan tentu rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi kita punya 1 hak penting dan 1 kewajiban penting. Hak kita adalah kita datang ke TPS memilih representasi politik baik itu presiden wakil presiden, DPD, DPRD, DPR atau lain-lain tetapi tugas dan kewajiban kita sebagai rakyat adalah sepanjang hidup untuk mengawal kekuasaan kita yang sudah terbentuk. Disisi lain, peserta sangat antusias dalam bertanya kepada narasumber mengenai perkembangan politik saat ini dan jelang pemilu 2024 yang ditimbulkan oleh kebebasan demokrasi. Penyampaian materi oleh narasumber menggunakan metode asosiasi yaitu menyampaikan materi sesuai fakta dan kejadian yang benar adanya serta pengalaman narasumber sebagai praktisi di bidang pemerhati dan perkembangan politik nasional.

Penelitian Eka Budiawani sebelumnya (2017) menunjukkan bahwa hasil penelitiannya menunjukkan bahwa keberhasilan sosialisasi politik melalui agen sosialisasi politik dan materi sosialisasi politik. Dibandingkan dengan hasil penelitian peneliti, yaitu kesuksesan



sosial. efisiensi perolehan logistik meningkat menjadi 40,1%, partisipasi dua pemilih sebesar 82,15%, kemudian besarnya sosialisasi yang dicapai melalui poster di sekolah dan jejaring sosial langsung ke pemilih millennial. Oleh Mery Anggrainy (2018) mempresentasikan temuan penelitiannya tentang faktor-faktor yang disebabkan oleh aktivitas ekonomi, sikap apatis, kandidat yang tidak dikenal dan informasi pemilu yang tidak akurat.

DISKUSI

Adapun tahapan kegiatan yang akan dilakukan meliputi 1) persiapan, yaitu berkoordinasi dengan tokoh pemuda yang berdomisili di suatu tempat tertentu dan lembaga pemerintahan (penyelenggara negara/komisi pemilihan umum daerah) untuk dapat berdiskusi dalam rangka pelaksanaan kegiatan Sosialisasi dan Literasi Komunikasi Politik bagi Generasi Milenial. Adapun kegiatan yang akan dilaksanakan dalam bentuk *talk show*; 2) Pelaksanaan, yaitu kegiatan ini dilakukan oleh tim PPM Dosen Unpad dengan dibantu oleh Neni Nur Hayati, M.I.Kom. selaku Direktur Democracy and Electoral Empowerment Partnership Indonesia sebagai narasumber yang diselenggarakan di Aula KPU Jawa Barat; 3) Evaluasi, yaitu diharapkan terjadi perubahan pada khalayak sasaran setelah mengikuti kegiatan PPM Dosen Unpad generasi milenial memiliki pengetahuan cukup mengenai perkembangan politik dan informasi politik jelang pemilu 2024.

Upaya selain melakukan kegiatan sosialisasi dan literasi politik jelang pemilu 2024, generasi milenial juga perlu untuk melakukan upaya mengikuti pendidikan politik secara berkelanjutan dengan tergabung pada lembaga-lembaga swadaya masyarakat maupun partai politik dalam upaya meningkatkan pengetahuan dan pengalaman diri yang dilakukan secara terintegrasi antara lembaga suprapolitik dan elemen masyarakat sipil, termasuk oleh semua pihak yang peduli terhadap kehidupan politik yang bersih.

PENUTUP

Kesimpulan

Rangkaian PPM Hybrid yang dilaksanakan pada rentang September-November 2022 ini. Kami berharap dengan sifat keterbukaan generasi milenial dapat semakin mudah menerima informasi dari luar dan peduli terhadap perkembangan politik saat ini. Selain itu, kami berharap dengan kehadiran tim PPM dosen Unpad setidaknya dapat memberikan pengetahuan dan rasa kewaspadaan bagi diri sendiri, keluarga dan seluruh generasi milenial terhadap isu-isu politik jelang pemilu 2024.

Pengakuan/Acknowledgements

Terima kasih kami sampaikan kepada pimpinan Rektorat Universitas Padjadjaran beserta jajarannya yang telah memfasilitasi dari sisi pendanaan untuk pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan literasi politik bagi generasi milenial. Dan tidak lupa kepada narasumber yang secara langsung terlibat memberikan pencerahan mengenai pentingnya politik bagi generasi penerus bangsa.

DAFTAR REFERENSI

- [1] Budiati, I., Susianto, Y., Adi, W. P., Ayuni, S., Reagan, H. A., Larasaty, P., Setiyawati, N., Pratiwi, A. I., & Saputri, V. G. (2018). Statistik Gender Tematik: Profil Generasi Milenial Indonesia. www.freepik.com
- [2] Juditha, C., & Darmawan, J. (2018). Penggunaan Media Digital dan Partisipasi Politik



- Generasi Milenial. *Jurnal Penelitian Komunikasi dan Opini Publik*, 22(2), 94–109. <https://jurnal.kominfo.go.id/index.php/jpkop/article/view/1628>
- [3] Perangin-angin, L. L. K., & Zainal, M. (2018). Partisipasi Politik Pemilih Pemula dalam Bingkai Jejaring Sosial di Media Sosial. *Jurnal SPIKOM*, 3(4), 737–754.
- [4] Pohan, H. A. (2019). Kepemimpinan di Era Milenial Ditinjau dari Aspek Komunikasi. *Jurnal Komunikasi Islam dan Kehumasan (JKPI)*, 3(2), 156–174. <http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/JKPI/article/view/5645/2966>
- [5] Rachmadi, R., & Budianto, H. (2020). Political Branding Tagar #2019gantipresiden Dalam Meningkatkan Elektabilitas Partai Keadilan Sejahtera Di Ranah Media Sosial. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, 7(11), 1099–1112. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i11.17057>
- [6] Rasyid, A. U. M., Widyastuti, S., Usman, F., Zulkifli, Syafruddin, Duppa, M. T., Guntur, M., Nurfadilah, Rahmadani, Sulaiman, Masri, A., Jariah, A., Pratama, A. A., & Haryanto. (2022). Edukasi Pemanfaatan Obat Tradisional Sebagai ASI Booster. *J-Abdi*, 2(7), 5371–5379.
- [7] Saefullah, M., & Rezeky, R. (2017). Strategi Humas Partai Gerindra dalam Membangun Citra Partai pada Pemilu 2014. *Nyimak*, 1(1), 79–105.
- [8] Suhadiyanto, A., & Lestari, P. (2008). Partisipasi Politik Perempuan: Studi Perempuan dalam Pemilihan Kepala daerah Jawa Tengah Tahun 2008. *Forum Ilmu Sosial*, 35(2), 93–103.



HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN